

Ridwan Kamil Disebut Lawan Seimbang Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta

JAKARTA (IM) - Mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan dan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menjadi dua tokoh yang disebut bakal meremajakan bursa calon gubernur di Pilkada DKI Jakarta 2024. Keduanya disebut sebagai lawan seimbang di pemilihan gubernur atau Pilgub DKI Jakarta.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menakar munculnya nama RK di bursa. Menurut Adi, RK merupakan lawan kuat inkumben.

"Kalau nama seperti Anies bisa maju, maka lawan yang sepadan cuma RK. Nama lain belum kompetitif," ucap Adi dalam keterangan yang dikutip Sabtu (8/6).

Adi melihat munculnya nama RK sesuai dengan berbagai hasil survei terkait Pilkada Jakarta. RK menjadi lawan kuat jika Anies maju.

"Anies masih paling kuat, ditempel ketat RK," kata dia.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menyampaikan elite partai politik masih saling intip. Sehingga belum muncul nama-nama yang pasti untuk bertarung di Jakarta, termasuk menimbang calon terbaik.

Menurut Ujang, saat ini Gerindra melihat sosok Dedi Mulyadi di Jawa Barat. Sehingga, terbuka peluang RK dicalonkan di Jakarta.

"Itu win-win solution agar KIM menang semua di dua daerah tersebut," kata Ujang.

Ahok dana Sahroni Diprediksi Ikut Bersaing

Selain Anies dan RK, nama besar lainnya masuk bursa Pilkada Jakarta. Mereka adalah Basuki Tjahaja

Purnama (Ahok), Tri Rismaharini, dan Ahmad Sahroni.

Dari nama-nama tersebut, RK menjadi figur yang sudah mengantongi surat tugas dari partai politik. Tidak hanya itu, belum lama Partai Gerindra memastikan bahwa mantan gubernur Jawa Barat itu akan mendapat surat rekomendasi untuk berkontestasi di Jakarta.

Keterangan tersebut disampaikan secara langsung oleh Ketua Harian Partai Gerindra Suferi Dasco Ahmad. Menyusul keterangan itu, Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan juga menyampaikan hal yang sama.

"Sudah sebulan yang lalu, kalau teman-teman buka jejak digital, saya menyampaikan kalau Jakarta Ridwan Kamil," kata dia kepada awak media di Jakarta.

Baik Partai Gerindra maupun PAN, punya pertimbangan dan perhitungan masing-masing berkaitan dengan hal tersebut. Namun, saat ditanya mengenai kepastian RK akan dicalonkan di Jakarta atau di Jawa Barat, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyampaikan bahwa sampai saat ini belum ada keputusan dari partainya.

"Menunggu keputusan partai dan tentu atas berbagai pertimbangan ketum kami dan Tim Pilkada DPP Partai Golkar," ungkap dia.

Keputusan akhir akan diambil setelah dilakukan kajian secara mendalam. Selain itu, Partai Golkar juga akan melihat hasil survei.

"Sesuai dengan hasil survei tersebut dan juklak internal Partai Golkar tentang penunjukan atau penetapan calon kepala daerah, kita masih ada dua kali survei," jelasnya. ● yan

4 | Metropolis

FOTO: ANT



GANDA CAMPURAN CHINA JIANG/WEI JUARA INDONESIA OPEN
Pebulu tangkis ganda campuran China Jiang Zhen Bang (kanan) dan Wei Ya Xin (kedua kanan), serta kompartiotnya Zheng Si Wei (kiri) dan Huang Ya Fiong (kedua kiri) berfoto bersama dalam babak final Indonesia Open 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (9/6). Jiang/Wei menjadi juara Indonesia Open 2024 setelah menang dua gim dengan skor 21-1-21 dan 21-14.

DPRD Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Regulasi Penertiban Parkir

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta harus mulai mengkaji potensi penarikan retribusi dari lahan parkir. Lahan parkir yang dikelola dengan baik bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail.

JAKARTA (IM) - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail meminta Pemprov menyiapkan regulasi untuk menuntaskan persoalan parkir liar di Jakarta. Menurutnya, penertiban parkir liar yang dijalankan sejauh ini tidak hanya bersifat

sementara. "Jadi harus lengkap bukan semacam tindakan penertiban sesaat," ujar Ismail saat dihubungi, Minggu (9/6). Ia mengatakan, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta harus mulai mengkaji potensi penarikan retribusi

dari lahan parkir. Lahan parkir yang dikelola dengan baik bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Namun sekali lagi ini harus dikaji dengan seksama oleh Dishub dari aspek legalnya, apakah mungkin itu ditetapkan sebagai area parkir resmi yang dipungut retribusi oleh Pemprov," ungkap Politisi PKS itu.

Salah satu kajian yang harus dijalankan yakni, adanya penentuan luas area lahan parkir yang dapat dikategorikan sebagai parkir resmi serta penempatan mesin parkir elektronik untuk parkir di badan jalan (on street parking). "Memungkinkan atau ti-

daknya itu perlu ada kajian pada batasan atau luas area yang memang layak untuk kategori dipungut parkir resmi atau tidak," kata Ismail.

Selain penertiban lahan parkir liar, sambung dia, sangat penting mengkaji upaya pemberdayaan Jukir liar. Supaya para pelaku yang kini menjalani praktik ilegal itu menyandang status resmi.

Dengan cara perekrutan secara resmi, maka Jukir akan menggunakan seragam, rompi, topi, membawa surat tugas, karcis resmi, dan kartu tanda pengenal.

"Untuk memberdayakan juru parkir liar, apakah memungkinkan direkrut menjadi juru parkir yang legal sebagaimana kita lihat di parkir on the street," ucap Ismail.

Ia berharap, langkah-langkah itu bisa menjadi upaya Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk penertiban parkir

liar dan juru parkir tak resmi yang selama ini meresahkan warga.

"Intinya, pertama adalah kita mengatasi keresahan masyarakat atas pungutan yang dianggap liar yang tadi," tandas Ismail.

Diketahui penyelenggara parkir yang memiliki lebih dari lima satuan ruang parkir atau luas area lebih dari 125 meter persegi, wajib memiliki izin dari gubernur. Izin tersebut terdiri dari izin penyelenggaraan parkir dengan memungut biaya parkir dan izin penyelenggaraan parkir tidak memungut biaya parkir.

Hal itu tertuang dalam Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran dan Pasal 12 Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan. ● yan



FOTO: ANTARA

WASIT BABAK FINAL GANDA PUTRI DI INDONESIA OPEN 2024

Wasit utama babak final ganda putri Indonesia Open 2024 Qomarul Lailiah memimpin pertandingan Korea Selatan Baek Ha Na dan Lee So Hee melawan ganda putri Tiongkok Chen Qing Chen dan Jia Yi Fan di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (9/6). Qomarul Lailiah wasit asal Surabaya, Jawa Timur itu pernah menjadi wasit di ajang Olimpiade Tokyo 2020 dan akan bertugas di Olimpiade Paris 2024.

Pencairan KJP Plus Terlambat, Begini Penjelasan Disdik DKI Jakarta

JAKARTA (IM) - Pencairan Kartu Jakarta Pintar (KJP) plus tahap I 2024 mengalami keterlambatan. Hal ini sempat dikeluhkan warga.

Kepala Dinas Pendidikan (KaDisdik) DKI Jakarta, Budi Awaludin menyebut keterlambatan pencairan KJP plus ini karena beberapa hal.

Menurut dia, perlu pemadanan dan verifikasi ulang seperti, penerima sebagai warga DKI Jakarta yang bermesilasi di DKI Jakarta.

"Warga penerima dipastikan tidak memiliki kendaraan roda 4 serta aset property di atas Rp 1 M," kata dia kepada wartawan, Minggu (9/6).

"Di samping itu dalam Kartu keluarga tidak ada yang berstatus sebagai PNS, TNI/Polri, Anggota MPR RI/DPR RI/DPD RI/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Pegawai tetap BUMN/BUMD," sambung dia.

Budi menerangkan, penerima kali ini perlu ada penyesuaian, sehingga perlu dilakukan verifikasi lapangan kembali.

"Hingga saat ini dari hasil pemadanan dan veri-

fikasi di lapangan masih terus bergerak. Untuk memastikan data penerima KJP Plus memang benar-benar berhak mendapatkannya, tim verifikasi akan lebih selektif dimulai 2024 ini," jelasnya.

Namun demikian, Disdik DKI Jakarta memastikan bahwa KJP Plus akan cair pada minggu ke 2 bulan ini.

"Dipastikan cair pada minggu kedua Juni 2024," jelas Budi.

Adapun pencairan dilakukan dalam beberapa tahapan.

Pada tahap I terdiri dari dua gelombang. Pada tahap ini merupakan penerima yang memang benar-benar membutuhkan atau sebagai warga kurang mampu hingga warga rentan.

Budi menegaskan bahwa program ini harus tepat sasaran serta pendistribusian harus selektif pada keluarga yang tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Dari jenjang SD sampai SMA atau sederajat, baik sekolah negeri maupun swasta jika tergolong sebagai warga tidak mampu maka berhak mendapatkan program ini," tegasnya. ● yan

Heru Budi Pastikan Tidak Kenakan Denda Rp50 Juta bagi Rumah Jadi Sarang Nyamuk

JAKARTA (IM) - Pejabat (Pi) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan sanksi denda Rp50 juta bagi warga yang membiarkan rumah menjadi sarang jentik nyamuk, sebatas gertakan dari pemerintah.

Pihaknya baru akan memberikan teguran kepada warga lewat juru pemantau jentik atau Jumanik.

"Kan bersama Jumanik, teguran sudah ada. Denda ya enggak lah," ujar Heru di kawasan Gelora Bung Karno, Minggu (9/6).

Lebih lanjut, Heru menjelaskan, adanya sosialisasi sanksi tersebut merupakan imbauan agar masyarakat ikut terlibat dalam memberantas nyamuk aedes aegypti yang menjadi penyebab Demam Berdarah Dengue (DBD).

"Itu kan di aturan, itu hanya imbauan supaya masyarakat juga peduli terhadap mengatasi demam berdarah," ucapnya.

"Kan kewajiban seorang warga negara di lingkungan rumah masing-masing harus sehat," katanya menambahkan.

Sementara, dalam aturan ini memang diatur pemberian sanksi teguran dalam bentuk Surat Peringatan pertama dan kedua alias SP 1 dan SP 2. Jika lebih dari itu, baru ada ketentuan sanksi denda.

Namun, ia meyakini petugas tidak akan sampai pada menjatuhkan sanksi denda kepada masyarakat.

"Enggak lah (sanksi denda). Itu kan di akhir, diusahakan tidak. Untuk seluruh Jakarta, kan kewajiban semua warga negara untuk menurunkan DBD," pungkasnya.

Sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Timur meminta warga tak membiarkan rumahnya menjadi sarang nyamuk aedes aegypti. Jika dibiarkan maka petugas akan menjatuhkan pemilik rumah sanksi denda.

Kasatpol PP Kota Jakarta Timur, Budhy Novian mengatakan, pemberian sanksi denda ini sesuai Pasal 21 dan 22 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Lewat cara

ini diharapkan kasus DBD di Jakarta Timur bisa menurun.

Warga yang melanggar, kata Budhy, tak langsung dikenakan sanksi denda. Begitu ditemukan ada jentik saat kegiatan pemberantasan sarang nyamuk (PSN), warga tersebut akan diberi surat peringatan pertama (SP1).

"Pemberian surat peringatan sudah mulai diterapkan, Jumat, 31 Mei kemarin. Tercatat ada 24 warga yang diberikan SP1 karena rumahnya ditemukan jentik nyamuk saat PSN. Paling banyak di Kecamatan Ciracas, Jatinegara dan Matraman," ujar Budhy kepada wartawan, Selasa (4/6).

Selanjutnya, jika masih juga ditemukan jentik nyamuk saat PSN berikutnya, pemilik rumah akan dijatuhi SP2. Apabila masih dibiarkan, maka yang bersangkutan akan termasuk melanggar tindak pidana ringan (tipiring) dan dikenakan sanksi denda.

"Jika sampai tiga kali dapat surat peringatan, maka akan diajukan untuk sidang tindak pidana ringan (tipiring)," pungkas Budhy. ● yan



FOTO: ANT

PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN SOSIALISASI DAMPAK NEGATIF ROKOK
Sejumlah warga memegang poster sosialisasi dampak negatif dari mengkonsumsi rokok pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Bekasi, Jawa Barat, Minggu (9/6). Dinas kesehatan Bekasi menyediakan layanan pemeriksaan kadar karbon monoksida untuk warga yang berolahraga di HBKB secara gratis dan mensosialisasikan dampak negatif dari mengkonsumsi rokok.

Menhub Ajak Masyarakat Naik Transportasi Umum

JAKARTA (IM) - Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi meninjau TransJakarta dari Halte Patra Kuningan menuju Ragunan, Jakarta Selatan, hari ini. Budi pun mengajak agar masyarakat menggunakan transportasi umum.

"Hari ini saya bersama Pak Dirjen, mau memastikan bahwa angkutan massa perkotaan di Jakarta berjalan dengan baik. Kita tahu Jakarta adalah kota yang menjadi contoh, kota yang lain harus melakukan," kata Budi saat melakukan peninjauan TransJakarta, Minggu (9/6).

Budi mengungkit muaranya tarif TransJakarta sebesar Rp 2000 pada pukul 05.00 s.d. 07.00 WIB. Semen-

tara, tarif normal sebesar Rp 3.500.

"Naik TransJakarta Rp 3.500, kalau pagi cuma Rp 2.000. Oleh karenanya saya mengajak, yuk naik angkutan massal," kata Budi.

Budi juga berpesan kepada seluruh kepala daerah untuk mengelola angkutan umum lebih baik di daerah masing-masing. Angkutan umum, sebut dia, bisa mengurangi polusi apalagi menggunakan transportasi berbasis listrik.

"Pada para wali kota seluruh Indonesia, ingat, kita pun kewajiban pada rakyat. Baru menggunakan angkutan massal, supaya tidak macet, tidak polusi. Apalagi di Jakarta banyak juga bus listrik," jelasnya. ● yan

TRANSRETAIL

PT ALFA RETAILINDO
("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan bersama ini mengundang pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari dan Tanggal : Selasa, 25 Juni 2024

Waktu : 10.00 WIB

Tempat : Kantor Pusat Perseroan, Gedung Transmart Cempaka Putih Lantai 3, Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 83, RT 010/RW 007, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10510.

Dengan agenda sebagai berikut:

- Laporan Pertanggungjawaban Direksi mengenai jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2023;
- Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023;
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2024; dan
- Lain-lain.

Catatan:

- Pemegang saham yang berhak untuk hadir atau diwakili dalam Rapat adalah mereka yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan.
- Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat menunjuk kuasanya untuk hadir dan memberikan suara atas namanya dalam Rapat. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai Perseroan dapat ditunjuk sebagai kuasa, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- Salinan surat kuasa harus telah diterima oleh Perseroan paling lambat tiga (3) hari sebelum tanggal Rapat.
- Salinan kartu tanda pengenal dari kuasanya harus telah diserahkan kepada Perseroan sebelum kuasanya tersebut hadir dalam Rapat.
- Demi terselenggaranya Rapat secara efisien dan teratur, kuasa Pemegang saham diminta hadir di tempat Rapat tiga puluh (30) menit sebelum Rapat dimulai.
- Seluruh bahan terkait agenda Rapat telah tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan ini dan akan tetap tersedia sampai dengan tanggal Rapat diadakan.

Jakarta, 10 Juni 2024

Direksi Perseroan